

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005)
- Attamimi, A.H.S. *Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Waktu Pelita I-Pelita IV* (Disertasi) fakultas pascasarjana universitas Indonesia), Jakarta, 1990.
- Atmosudirjo, S. Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesepuluh; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Dood, Lawrence, *Coalitions in Parliamentary Government*, Princeton University Press, New Jersey, 1976
- Ernie dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Penerbit: Prenada Media, Jakarta, 2005
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
- Gie, The Liang, *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-undang Tentang Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Yogyakarta, Karya Kencana, 1997
- HR. Ridwan, *Hukum administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1994
- *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2007
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan III, Nusa Media, Bandung, 2012.
- , *Ilmu Negara.*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Alumni, 2004
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1997

- LGSP, “*Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik*”. LGSP: Jakarta 2009
- Marbun, Sf, *Peradilan Administrasi Negara Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, 1997
- M. Hadjon, Philipus, *Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Meritokrasi* Vol. 1, 2002.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Perdana, Surya. *Kedudukan Lembaga legislatif dalam Mewujudkan Good Governance setelah Berlakunya Otonomi Daerah, Media Hukum*, Volume XIV, Nomor 1. 2005
- Rasyid, M. Ryaas Syauckani HR, dan Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
- Santoso, HM. Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Simarmata, Rikardo. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, Cetakan ke 13, 2011.
- Solossa, Jacobus Pervidya, *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua di dalam NKRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Suwandi, *Menggagas Otonomi Daerah di Masa Depan*, Samitra Media Utama, Jakarta, 2005
- Syafrudin, Ateng, *Kepala Daerah, Bandung*, Citra Aditya Bakti, 1994
- Wahidin, Samsul. *Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Wiwoho, Jamal. *Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat UUD 1945*, UNS Press, Surakarta, 2006

Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid pertama, Jakarta, tanpa penerbit, 1959

Yudoyono, Bambang, *Jogja Memang Istimewa*, Galang press, Yogyakarta, 2017

Jurnal, Makalah & Tesis

Asmawi, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014

Budiyono, " *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*". Jurnal Ilmu Hukum Volume 7, Januari 2013

Fitriyah, *Posisi DPRD Dalam UU No. 32 Tahun 2004*, Vol 1, No 1 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik

Huda, Ni'matul *Otonomi Luas (Perspektif Yuridis dan Politis)*, Jurnal Millah Vol.1. No. Agustus, 2001.

Jaweng, Robet Endi " *Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*", Jurnal Analisis CSIS, Vol 40, No. 2, Juni 2011

Karim, Muhammad Qur'anul, *Analisis Fungsi Pengawasan DPRD DIY terhadap Pelaksanaan Rekomendasi UUK DIY*, Tesis, Magister Ilmu Pemerintahan, UMY, Yogyakarta, 2018

Materay, Korneles, *Perbandingan Penerapan Asas Desentralisasi Dalam Politik Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Makalah

M. Syamsudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Program Magister Hukum UII

Thaib, Dahlan, *DPRD dan Otonomi Daerah (Kajian Dari Sudut Pandang HTN)*, Jurnal, Millah Vol.1.No.Agustus, 2001

Thalhah, M., *Ringkasan Disertasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa*, perpustakaan MH UII, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339 Tentang Keistimewaan DIY

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41; Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 1 Tahun 2014 Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88 Tentang Tata Tertib

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/2017 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2017

Data Elektronik

https://www.academia.edu/14020908/UPAYA_MENINGKATKAN_FUNGSI_PENGAWASAN_DEWAN_PERWAKILAN_RAKYAT_DAERAH_DPR_D_DAERAH_ISTIMEWA_YOGYAKARTA diakses 25 agustus 2018 - Bambang Wahyu Nugroho, S.Ip., M.A, Upaya Meningkatkan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Natal Kristiono, S.Pd., MH, Buku Ajar Otonomi Daerah, Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. 114
https://www.researchgate.net/publication/301781570_DIKTAT_OTODA_PAK_NATAL_-_Copy diakses 17 oktober 2018

<http://www.dprd-diy.go.id/> di akses tanggal 14 September 2018

<https://daerah.sindonews.com/read/1226314/189/angka-kemiskinan-diy-tertinggi-se-jawa-1501649326> di akses 20 juli 2019

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4191449/6-tahun-uu-keistimewaan-diy-ini-dia-catatan-sri-sultan-hb-x> diakses 20 juli 2019

<http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/09/03/165328/serapan-dana-keistimewaan-yogya-baru-42-persen> diakses 2 november 2018

http://koran-sindo.com/page/news/2017-05-12/6/1/Klaim_Tanah_Trah_HB_VII_Mulai_Meresahkan diakses tanggal 1 november 2018

<https://www.dprd-diy.go.id/adukan-oknum-yang-mengaku-trah-hb-vii-ke-dprd-diy/> diakses 1 november 2018

Kamus

Kamus Besar Indonesia, Tim Penyusun Kamus, Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Ed 2- Ed 9, Jakarta, Balai Pustaka, 1997.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.